Indonesian Journal of Disability Studies
ISSN : 2355-2158

Implementasi Aksesibilitas Pada Gedung Baru Perpustakaan UGM

[*]Harry Kurniawan

Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, FT UGM ; Arsitek Proyek Perpustakaan UGM

Abstract: *Sebagai sebuah fasilitas publik, Perpustakaan harus mampu melayani semua penggunanya tanpa terkecuali. Layanan yang adil untuk semua orang tersebut tentu saja melibatkan banyak hal, tidak terkecuali aspek fasilitas fisik bangunannya. Tuntutan ini tidak hanya menjadi sebuah kesadaran bersama tetapi juga telah menjadi norma positif yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan terkait lainnya. Hal ini menjadi landasan dasar dalam perancangan Gedung baru Perpustakaan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2010-2012 yang lalu.*

Implementasi aksesibilitas fisik pada Gedung baru Perpustakaan UGM ini direncanakan dan dirancang untuk menjamin aktivitas pengunjung mulai dari luar bangunan hingga ke setiap fungsi di dalam bangunan. Beberapa aspek aksesibilitas yang diimpelentasikan tersebut antara lain terkait dengan sistem sirkulasi, sistem informasi, serta detil-detil penunjang lainnya. Implementasi ini juga diharapkan menjadi contoh dan bahan pembelajaran bagi isu aksesibilitas fisik di gedung lainnya di dalam maupun di luar Kampus UGM.

Keywords: *aksesibilitas, perpustakaan, gedung*

1. Latar belakang

Persamaan hak bagi semua orang tanpa terkecuali telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi kepedulian masyarakat dunia (melalui PBB maupun deklarasi Convention of Rights for People with Disability/CRPD). Salah satu hak yang dijamin adalah kesempatan untuk menjalankan semua kegiatannya dengan mudah, aman, nyaman yang diwujudkan melalui ketersediaan aksesibilitas fisik. Di Indonesia, ketersediaan aksesibilitas fisik ini diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PU No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan. Kedua peraturan tingkat nasional ini memerintahkan setiap bangunan publik untuk memenuhi standar aksesibilitas seperti yang telah diatur oleh Pemerintah di dalam keduanya. Perpustakaan di Kampus UGM merupakan salah satu fungsi utama yang digunakan oleh hampir semua masyarakat kampus UGM dan juga masyarakat kampus lainnya ataupun masyarakat umum, sehingga sudah seharusnya Gedung Perpustakaan UGM ini memenuhi standar aksesibilitas yang telah diatur secara nasional.

Bahkan jika melihat konteks lokal (Kampus UGM) maka kebijakan kampus juga mengharuskan bangunan-bangunan baru untuk menjamin aksesibilitas bagi semua orang tanpa terkecuali, seperti yang tertulis dalam Keputusan Majelis Wali Amanat No. 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga, pada Bab Rencana Induk Kampus (RIK) Pasal 102 Ayat (1) yang berbunyi, "RIK berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan tanggung jawab Pimpinan Universitas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan fisik yang efisien, fungsional, dan nyaman dalam rangka melaksanakan misi dan mencakup tujuan Universitas, antara lain mencakup tata guna tanah, integrasi yang serasi antara bangunan dengan ruang terbuka, peralatan dan jaringan pelayanan yang memadai, serta sistem transportasi dan sarana pejalan kaki yang aman dan aksesibel."

* Corresponding Author. Email: selamatpagi2001@yahoo.com
Published online at ijds.ub.ac.id
Copyright © 2014 Author(s) Licensed under CC BY-NC.

Gambar 1. Suasana Sisi Selatan Gedung Perpustakaan UGM (Kurniawan, 2012)

Dalam konteks implementasi aksesibilitas, Gedung Perpustakaan UGM yang terdiri dari beberapa massa bangunan dan juga terhubung dengan dua bangunan eksisting akan menjadi pembelajaran yang lengkap tentang bagaimana aksesibilitas di dalam satu bangunan maupun beberapa bangunan bekerja. Permasalahan aksesibilitas yang muncul saat menghubungkan bangunan baru dan bangunan lama perlu diselesaikan dengan kreativitas sehingga solusi yang diperoleh tidak terkesan dipaksakan dan keluar dari peraturan aksesibilitas yang ada.

Gambar 2. *Site Plan* Perencanaan Gedung Perpustakaan UGM (Dokumentasi CUDD, 2010)

2. Tinjauan Pustaka

1. Perancangan Aksesibilitas

Aksesibilitas, menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006, adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Perancangan fasilitas yang ramah untuk semua akan terkait dengan dua hal yaitu mobilitas dan aksesibilitas. Prinsip yang harus dipegang dalam perancangan mobilitas dan aksesibilitas tersebut adalah memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai, masuk ke semua tempat, serta memanfaatkan fasilitas yang ada tanpa menjadi objek belas kasihan. UNESCAP (1995) menjelaskan prinsip tersebut melalui diagram seperti pada gambar 3. Keempat prinsip ini bekerja sebagai sebuah urutan yang harus dapat diwujudkan secara utuh. Implementasi yang tidak berhasil atau bahkan tidak adanya implementasi di salah satu prinsip akan membuat aksesibilitas dan mobilitas yang ramah bagi semua tidak akan terlaksana.

Makna yang ingin disampaikan oleh prinsip-prinsip di atas juga dapat dibaca dari Asas fasilitas dan aksesibilitas yang dirumuskan oleh Permen PU No. 30/PRT/M/2006, yaitu:

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Bagian penting dari Permen PU No. 30/PRT/M/2006 sebagai panduan implementasi adalah mengatur beberapa persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang meliputi: Ukuran dasar ruang; Jalur pedestrian; Jalur pemandu; Area parkir; Pintu; Ram; Tangga; Lift;Lift tangga (*stairway lift*); Toilet; Pancuran; Wastafel; Telepon; Perlengkapan dan Peralatan Kontrol; Perabot serta Rambu dan Marka.

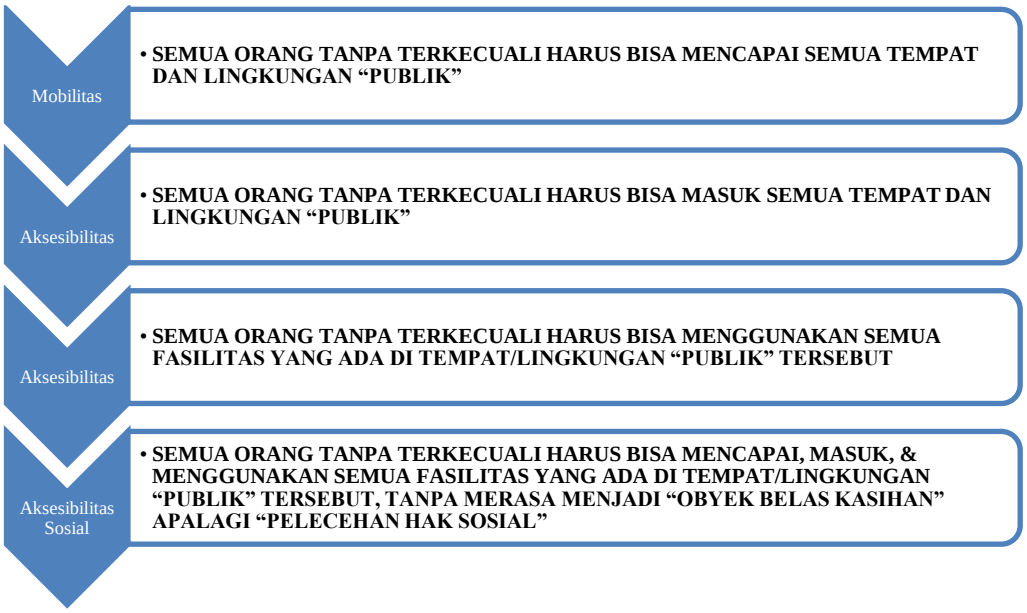

Gambar 3. Prinsip mobilitas, aksesibilitas, dan aksesibilitas sosial (UNESCAP, 1995)

2. Karakterstik difabel

Difabel merupakan akronim dari dua kata bahasa Inggris *Different Abbility* yang berarti kemampuan yang berbeda. Istilah ini muncul untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang diskriminatif dan melihat manusia sebagai sosok yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok normal dan tidak normal hanya berdasarkan kelengkapan kondisi fisiknya. Fakta menunjukkan bahwa yang sebenarnya ada adalah perbedaan cara dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kurniawan (2011) menyebutkan beberapa kelompok yang termasuk dalam deskripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pengguna kursi roda
b. Ambulant disabled
c. Ketulian dan gangguan pendengaran
d. Keterbatasan visual
e. Keterbelakangan mental
f. Orang dengan keterbatasan kemampuan kognitif
g. Orang dengan beragam keterbatasan kemampuan, dan
h. Lanjut usia
i. Anak-anak

Dari beberapa kelompok tersebut, pemahaman karakter difabel pada Gedung Perpustakaan UGM ini difokuskan pada beberapa kelompok sebagai *benchmark* dengan pertimbangan kebutuhan khusus yang mereka butuhkan, seperti tuna netra, lanjut usia, dan pengguna kursi roda. Karakter-karakter tersebut, menurut Kurniawan, dkk (2014), adalah:

1) Pengguna Kursi Roda

Pengguna kursi roda adalah orang dengan ketidakmampuan yang bergantung pada kursi roda dalam mobilitasnya. Kriteria yang mendasari pengguna kursi roda ditempatkan dalam kelompok difabel adalah:

a) berada di level yang lebih rendah daripada orang kebanyakan;
b) berukuran lebih lebar dari kebanyakan orang (karena ditambah lebar kursi roda);
c) hanya bisa menjangkau tempat yang bisa dilalui kursi rodanya.

Beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas pengguna kursi roda adalah sebagai berikut:

a) penempatan semua jenis perabot, panel kontrol dan peralatan harus berada dalam jangkauan;
b) harus memenuhi persyaratan luasan ruang minimal;
c) perbedaan ketinggian lantai harus disikapi dengan menambahkan ramp atau lift;
d) permukaan lantai harus terbuat dari material yang halus dan keras.

2) Tunanetra atau Gangguan Penglihatan

Kriteria yang mendasari orang dengan gangguan penglihatan ditempatkan sebagai difabel adalah sebagai berikut:

a. Sulit melihat detail yang ada di lingkungan mereka. Benda-benda terlihat

berkabut/kabur. Hanya bisa mengamati benda-benda berukuran besar atau hanya bisa membedakan cahaya dan bayangan
b. Silau dari lantai yang dipoles sangat halus dan permukaan dinding yang sangat reflektif dapat membutakan, seperti ketika melihat cahaya terang dari pencahayaan langsung atau dari jendela
c. Tidak bisa melihat dengan jelas pada tingkat pencahayaan rendah
d. Wilayah pandangan yang sempit

Orang dengan gangguan penglihatan terutama tunanetra cukup mudah dikenali saat bermobilitas. Dengan keterbatasan penglihatan yang dimiliki, tunanetra membutuhkan alat bantu untuk bermobilitas seperti tongkat putih atau pun anjing pemandu. Keduanya berperan untuk menggantikan fungsi penglihatan dengan memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan di sekitarnya. Beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas orang dengan gangguan visual adalah sebagai berikut:

a. Area-area yang membawa potensi bahaya dihindari atau harus dapat diidentifikasi dengan mudah (dengan kontras warna pada tone warna yang sama untuk gangguan penglihatan atau guiding block untuk tuna netra);
b. Area open-plan yang luas sebaiknya dihindari atau harus dipecah ke dalam area-area yang lebih kecil (seperti dengan menggunakan furniture)
c. Koridor berada di sebelah kanan koridor yang lain;
d. Ruang-ruang dibuat terang, bebas silau dan tanpa bayangan;
e. Ruang-ruang berbentuk persegi empat, karena tuna netra lebih mudah mengorientasikan dirinya sendiri dengan depan, belakang, kiri atau kanan dipandingkan secara diagonal atau dalam kurva;
f. Pintu harus selalu terbuka dari area sibuk dan rute sirkulasi ke arah ruang yang tidak sibuk;
g. Tujuan-tujuan persinggahan penting di dalam bangunan, seperti meja resepsionis, tangga, lift dan toilet, harus diletakkan di tempat yang jelas dan dapat diprediksi;
h. Penyediaan petunjuk orientasi dengan elemen timbul (seperti peta timbul yang diletakkan di pintu masuk bangunan dan guiding block atau varias permukaan lantai);
i. Handrail yang juga dilengkapi dengan informasi Braille;
j. Penggunaan kaca anti pecah pada elemen dinding yang menggunakan kaca dan juga pintu kaca;
k. Penanda visual yang ada dilengkapi dengan penanda audio;
l. Penciptaan akustik yang konsisten sepanjang ruang.

3) Orang Lanjut Usia

Orang lanjut usia atau yang disingkat dengan lansia adalah orang-orang berumur 50 tahun atau lebih. Pada rentang usia tersebut, manusia mengalami penurunan berbagai fungsi dan kemampuan anggota tubuh. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa manusia yang sudah memasuki fase lanjut usia akan kembali seperti anak-anak karena ketidakmampuannya melakukan hal-hal yang cakap dikerjakan manusia dewasa. Selain penurunan kondisi fisik, lansia juga mengalami ketidakseimbangan emosional seiring dengan pertambahan usianya. Kriteria yang mendasari orang lanjut usia ditempatkan dalam kelompok difabel, antara lain: (a) tidak mampu mempertahankan usaha fisik- misalnya berdiri dalam jangka waktu lama atau membawa barang-barang berat meskipun hanya dalam jarak dekat; (b) kesulitan mengangkat, mendorong, dan menarik benda-benda atau menaikkan atau merendahkan posisi tubuh mereka (misalnya dari posisi duduk ke posisi berdiri). Beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas orang lanjut usia adalah sebagai berikut:

a. Area-area yang berpotensi membahayakan harus dihilangkan;
b. Fitur-fitur desain yang bisa mencegah kecelakaan harus disediakan (seperti handrail dan permukaan ”yang anti terpleset”);
c. Kamar mandi/toilet yang aksesibel yang dilengkapi dengan bangku;
d. Menyediakan alat bantu orientasi (seperti lantai dengan kode warna, petunjuk untuk membedakan hall).

3. Metode Penelitian

Proses implementasi aksesibilitas pada perencanaan dan perancangan Gedung

Perpustakaan UGM ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Observasi hubungan antara rencana gedung perpustakaan UGM dengan gedung-gedung serta fasilitas di sekelilingnya
2. Studi literatur dan penentuan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan difabel
3. Menentukan titik-titik implementasi aksesibilitas
4. Merancang bentuk implementasi
5. Aplikasi rancangan saat proses konstruksi bangunan

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi aksesibilitas pada Gedung Perpustakaan UGM ini dilakukan pada dua bagian utama, yaitu sistem sirkulasi dan sistem informasi. Kedua sistem tersebut sangat penting untuk menjamin kelancaran dan kemudahan mobilitas dan aktivitas di dalam gedung. Beberapa fasilitas lain yang aksesibel juga ditambahkan sebagai elemen penunjang sistem sirkulasi dan sistem informasi tersebut. Penjelasan rinci implementasi aksesibilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem sirkulasi
   Aksesibilitas dalam sistem sirkulasi bertujuan untuk menjamin mobilitas dari dan ke Gedung/Kompleks Perpustakaan UGM dengan gedung dan lingkungan sekitarnya, serta mobilitas di dalam bangunan. Beberapa implementasi aksesibilitas sistem sirkulasi tersebut antara lain:
   a. Ramp entrance
      Pintu masuk utama Perpustakaan UGM terdapat di dua lokasi, yaitu di fasad selatan L1 dan fasad utara L4 (belum terbangun hingga saat ini, dan untuk saat ini, pintu masuk utara berada pada pintu samping bangunan L1). Fokus utama untuk menghubungkan bangunan ini dengan lingkungan di sekitarnya adalah pada pintu masuk selatan L1. Pergerakan utama menuju pintu masuk selatan L1 ini berasal dari sisi tenggara (Gedung Grha Sabha Pramana dan fungsi-fungsi gedung perkuliahan) dan sisi timur yang berasal dari mahasiswa kluster Humaniora dan Agro. Sedangkan pergerakan dari sisi barat laut tidak terlalu signifikan karena tidak ada fungsi-fungsi kampus yang bisa terhubung langsung dengan Perpustakaan UGM dari sisi ini. Pertimbangan tersebut memutuskan bahwa ramp akan berada di sisi barat/tenggara pintu masuk L1.

Gambar 4. Skema Sirkulasi Perencanaan Gedung Perpustakaan UGM (Dokumentasi CUDD, 2010)

Ramp di luar bangunan yang menuju teras Unit L1 ini terdiri dari dua unit ramp. Ramp pertama menghubungkan teras dengan halaman/parkir kendaraan bermotor, sedangkan ramp kedua menghubungkan halaman dengan jalan/jalur pedestrian. Kedua ramp dibuat dengan kemiringan 6 derajat dan menggunakan material lantai conblock dan plesteran semen kasar untuk menghindari lantai yang licin. Ramp juga dilengkapi dengan handrail untuk membantu pengguna kruk atau orang tua saat melalui ramp ini.

Gambar 5. Ramp dari halaman menuju teras Unit L1 Perpustakaan UGM (Kurniawan, 2013)

b. Tidak ada perbedaan ketinggian lantai
Hambatan yang sering terjadi namun tidak disadari berdampak besar pada mobilitas difabel adalah keberadaan perbedaan ketinggian lantai antar ruang, misalkan antara teras dengan lobby, lobby dengan ruang-ruang fungsional lainnya, ruang fungsional dengan ruang toilet. Ketinggian

yang umumnya berkisar 3cm hingga 10 cm pada perpustakaan ini dihilangkan atau diminimalisir hingga maksimal 1cm. Perbedaan ketinggian maksimal 1 cm yang masih muncul untuk menghindari masuknya air pada ruang fungsional yaitu di area kamar mandi. Ketinggian 1cm dirasa masih bisa dilalui dengan mudah oleh difabel.

Gambar 6. Lobyy Unit L1 Perpustakaan UGM (Kurniawan, 2013)

c. Lantai ramp penyambung L1 dengan unit III

Pada lantai dua unit L1 dan Unit III terdapat selisih yang cukup besar hingga 30cm, sehingga diperlukan ramp untuk menjamin hubungan yang nyaman, mudah dan aman bagi mobilitas difabel. Pada komponen bangunan L1 memang terdapat sayap koridor yang memungkinkan untuk digunakan menyesuaikan perbedaan ketinggian lantai ini. Pilihan yang dipergunakan adalah menjadikan semua lantai ini sebagai ramp, sehingga ruang gerak yang luas dapat tersedia serta kesan ramp sebagai fasilitas tambahan/ekskulisif menjadi hilang.

d. Ramp lantai 3 L1 dengan Unit I dan Unit III dengan L5

Resiko menyambung dua unit bangunan dengan bangunan baru adalah terdapat selisih ketinggian lantai yang tidak bisa disamakan. Pada kasus lantai III L1 dengan lantai 3 Unit I dan Unit III adalah sulitnya mengambil salah satu ketinggian bangunan eksiting sebagai patokan, karena akan terjadi selisih ketinggian yang sangat besar. Sehingga ketinggian lantai III L1 diputuskan berada di antara ketinggian Unit III dan Unit I dengan kelandaian ramp L1 dan Unit III yang landai sebagai patokan. Selisih ketinggian L1 dan Unit I adalah 80 cm, sehingga membutuhkan ramp landai yang cukup panjang. Untuk mensiasatinya maka selain ramp dibuat maka sebagian bordes akhir ramp didesain dalam bentuk teras dan tangga, sehingga dapat berfungsi sebagai ruang diskusi informal dan transisi ruang yang baik. Ramp dilengkapi dengan handrail dan material lantai granite kasar (jenis rock/outdoor).

Gambar 7. Ramp penghubung Unit L1 dengan Unit I Perpustakaan UGM (Kurniawan, 2013)

Perbedaan lantai Unit III dengan L5 memerlukan penyelesaian yang berbeda, karena sulit untuk membuat sayap koridor L5 menjadi ramp terdapat beberapa ruang sehingga tidak memungkinkan membuat ramp. Ramp diletakkan di selasar penghubung L1 dan L5 yang berada di luar unit III.

e. Tangga yang aksesibel

Tangga di dalam Gedung Perpustakaan ini adalah elemen utama mobilitas vertikal pengunjung maupun pengelola. Oleh karena itu, tangga harus didesain untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Hal yang harus diperhatikan adalah jumlah anak tangga dan bordes, serta lebar dan tinggi masing-masing anak tangga. Sesuai dengan peraturan, tingga anak tangga yang nyaman adalah maksimal 17,5cm sedangkan lebar anak tangga adalah 30cm. ini memungkinkan orang tua, anak-anak, dan pengguna kruk untuk naik dan turun dengan kekuatan yang mereka miliki. Selain itu jumlah anak tangga sebelum bordes/lantai maksimal dijaga agar tidak lebih dari 11 anak tangga (jumlah yang dianggap sebagai

titik akhir kenyamanan menaiki tangga).

Gambar 8. Tangga Utama Unit L1 Perpustakaan UGM (Kurniawan, 2013)

f. Lift

Beberapa fitur yang menjadikan lift aksesibel adalah: (i) Pintu lift minimal 900mm yang memungkinkan untuk kursi roda masuk ke dalam kabin lift (ii) Handrail di bagian dalam (iii) Tombol lift rendah (iv) Tombol lift yang dilengkapi dengan huruf braille (v) Cermin Beberapa fitur lain yang masuk dalam rencana tetapi tidak jadi diimplementasikan adalah fitur informasi suara.

Gambar 9. Interior Lift Unit Perpustakaan UGM (Kurniawan, 2013)

2. Sistem informasi

Salah satu aksesibilitas yang penting adalah jaminan sistem informasi yang bisa diakses semua orang. Ada beberapa yang diimplementasikan antara lain:

a. Tactile map

Tactile map atau peta timbul dibuat untuk memudahkan semua orang termasuk tuna netra. Informasi yang disampaikan adalah denah ruang dan fungsi ruang (termasuk dalam huruf braille). Peta ini terdiri dari satu peta besar yang berisi denah keseluruhan komplek bangunan dan diletakkan di luar bangunan, serta peta-peta tiap lantai Unit bangunan.

Gambar 10. Fitur tactile map Perpustakaan UGM yang berada di lansekap dan dalam bangunan (Kurniawan, 2013)

b. Meja informasi

Meja informasi harus dapat dipergunakan oleh semua orang. Hal yang perlu diperhatikan adalah terjaganya komunikasi visual dan audio yang baik dan nyaman. Kunci untuk tercapainya kondisi tersebut adalah ketinggian meja yang tidak boleh menghalangi difabel yang rendah (seperti anak-anak, orang kerdil, pengguna kursi roda). Oleh karena itu, ketinggian meja

informasi dibuat tidak lebih dari 80cm, dan untuk menghindari kesan eksklusifitas maka keseluruhan ketinggian meja dibuat sama.

Gambar 11. Meja Informasi yang berada di Atrium/Lobby Unit L1 (Kurniawan, 2013)

3. Fasilitas penunjang
   a. Toilet aksesibel
      Ruang manuver yang memadai dan fasilitas *handrail* seperti yang diatur pada Permen PU No. 30/PRT/M/2006 diimplementasikan pada toilet aksesibel di Gedung Perpustakaan UGM ini. Dimensi ruang toilet aksesibel ini adalah 2 x 2,375m yang berisi kloset duduk yang dilengkapi handrail pada dinding di sekelilingnya. Selain itu, bukaan lebar 1 meter dengan pintu geser lipat dipilih untuk memudahkan membuka pintu sekaligus mengatasi keterbatasan ruang untuk membuat pintu geser penuh.
   b. Wastafel
      Hal utama yang diperhatikan dalam desain wastafel di Gedung ini adalah ketinggian dan ruang di bawah wastafel. Permukaan wastafel diatur di ketinggian 80 cm dengan menyediakan rongga di bawah wastafel untuk memudahkan pengguna kursi roda mendekat ke wastafel. Selain itu keran tekan dipilih untuk memudahkan penggunaan oleh orang tua maupun tuna daksa (serta sebagai bentuk implementasi konsep *green building*).

5. Kesimpulan

Proses implementasi aksesibilitas pada Gedung Perpustakaan UGM ini dilakukan melalui studi literatur maupun observasi pada kondisi Perpustakaan yang telah berdiri sebelumnya. Kesempatan untuk melakukan perencanaan matang sejak awal menjadikan implementasi yang dirancang dapat komprehensif dan utuh, sehingga aktivitas yang mudah, aman, dan nyaman dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam implementasi aksesibilitas di Gedung perpustakaan ini adalah:

1. Detail rencana yang matang
2. Kontrol yang terus menerus terhadap proses perwujudan rencana aksesibilitas
3. Kreativitas dalam penyelesaian masalah aksesibilitas

Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas perancangan aksesibilitas tetap sesuai dengan konsep dan tujuan awal perencanaan aksesibilitas di Gedung ini.

6. Daftar Pustaka

Kurniawan, Harry. (2011). Familiarity in Designing a Mosque: A Practice of Universal Design. *Work Programme - Architecture for All*. Tokyo World Congress Programme. Tokyo.

Kurniawan, Harry., Ikaputra, dan Sandra Forestyana. (2014). *Perancangan Aksesibilitas untuk Fasilitas Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP). (1995). *Promotion of Non-handicapping Physical Environments for Disabled Persons*. http://www.dinf.ne.jp/doc/english/intl/z15/z15009gl/z1500901.html, diakses 13 November 2013).

Universitas Gadjah Mada. (2003). *Keputusan Majelis Wali Amanat No. 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga.* Yogyakarta.